

TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU

Peluang Menuju Ekonomi Hijau

JAKARTA (KR) - Jesuit Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional 'Prospek Ekonomi Indonesia di Era Pemerintahan Baru: Tantangan, Peluang & Catatan', di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Seminar menghadirkan narasumber Mari Elka Pangestu (praktisi ekonomi), C Harinowo (Komisaris BCA), dengan moderator Eduardus Tandellin (Guru Besar FEB UGM). Seminar dihadiri sekitar 300 peserta yang mewakili akademisi, pengusaha, perbankan dan lembaga pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati dalam sambutan kunci mengatakan, setidaknya terdapat empat hal ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia pada saat ini dan masa mendatang,



KR-Istimewa

Paparan para pembicara.

yakni higher for longer, tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan digitalisasi. Secara implisit, Menku menyebut keempat hal tersebut menjadi tantangan yang dihadapi pemerintahan baru mendatang.

"Pemerintahan baru mendatang harus mampu mendorong pertumbuhan eko-

nomi dari 5 persen menjadi 6-7 persen pertahun," harap Mari Elka Pangestu yang mantan Menteri Perdagangan.

Untuk itu Mari merekomendasikan antara lain, meningkatkan produktivitas atau menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), khusus-

nya untuk sumber daya manusia, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Kemudian mendorong iklim bisnis yang mampu meningkatkan PMA dan sektor-sektor industri yang berorientasi ekspor, serta meningkatkan tabungan pemerintahan.

"Ekonomi hijau khususnya energi hijau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di masa depan," jelas Harinowo. Menurut Harinowo, Indonesia mempunyai sumber-sumber energi hijau yang melimpah seperti matahari, angin, air dan panas bumi. Energi hijau adalah energi bersih yang tidak mencemari atau menambah polutan di atmosfer. Dalam memanfaatkan energi hijau harus disiapkan sumber daya manusia dan teknologi agar hasilnya optimal. (Rsv)-f

Wapres Resmikan Gedung Landmark BSI Aceh



KR-Istimewa

Wapres KH Ma'ruf Amin meresmikan Gedung BSI Aceh.

ACEH (KR) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan gedung ramah lingkungan Landmark BSI Aceh yang terletak di Jalan Teungku Daud Beureuh No 15 Banda Aceh, Kamis (30/5). Gedung ini merupakan gedung bank syariah pertama yang mengusung konsep ramah lingkungan atau green building. Peresmian gedung ini juga didampingi Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Komisaris

Utama BSI Muliawan D Hadad, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dan Wali Nangroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar.

Wapres mengatakan, Gedung BSI Landmark Aceh diharapkan mampu merepresentasikan bank syariah yang modern dan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah, tetapi juga sebagai poros penggerak pertumbuhan ekonomi dan ke-

uangan syariah di Aceh. Hery Gunardi mengatakan, BSI akan hadir selamanya di Aceh dan menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh. BSI terus mengoptimalkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh terutama dalam hal percepatan ekonomi, sosial dan pariwisata.

Wapres juga meresmikan dua Desa Binaan BSI Klaster Nilam dan Kopi. Klaster Perkebunan Kopi di Desa Gegerung dapat menghasilkan panen 69 ton dengan lahan seluas 30 ha, dan jumlah mitra 600 jiwa. Sementara Klaster Perkebunan Nilam di Desa Blang Mee mampu menghasilkan 4.199 kg panen daun kering dan 102 kg sulingan minyak, dengan lahan Tahap 1 seluas 6,6 ha dari 20 ha lahan yang direncanakan. Desa binaan ini memiliki mitra 365 jiwa. (Ogi)-f

Jemaah

"Jemaah harus membawa smart card selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Armuzna. Smart card berisi sejumlah data di dalamnya, yakni nama jemaah, foto, tempat tanggal lahir, nomor visa dan provider yang menerbitkannya serta lokasi pemondokan jemaah di Makkah," ungkapnya.

Mengingat pentingnya smart card tersebut, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), *mewanti-wanti* jemaah agar menjaga sebaik mungkin dan jangan sampai hilang atau tertinggal terutama saat tawaf.

Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi, Kamis kemarin, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 131.513 orang terbagi dalam 335 kloter. Jemaah yang wafat hing-

ga saat ini 25 orang. Seluruh jemaah haji yang wafat akan dibadhalhajikan.

Sementara itu, keterlambatan keberangkatan jemaah haji membuat para jemaah was-was dan sempat menimbulkan tanda tanya mengenai kepastian keberangkatan.

Namun, karena penerbangan merupakan perjalanan ibadah, maka kekecewaan dipendam dengan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Demikian sejumlah pandangan para penumpang jemaah haji yang diterbangkan dengan maskapai Garuda Indonesia, khususnya yang terkena langsung keterlambatan pesawat.

Salah satu jemaah dari Kabupaten Semarang Kloter SOC-58, Aries mengungkapkan, dirinya sempat tanda tanya dengan

keterlambatan tersebut, sehingga sempat was was. Pemberitahuan perubahan jadwal, melegakan, sehingga ia bersiap untuk ke Embarkasi Solo sesuai jadwal keberangkatan yang baru.

Hal yang sama disampaikan jemaah lainnya yang juga dari Kabupaten Semarang, Mujiono. Ia berharap pihak Garuda bisa mengoreksi kekurangan yang terjadi. "Saya sendiri mengambil hikmah dari keterlambatan ini," ujarnya.

Harapan terhadap perbaikan maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ditekankan Ketua Kloter SOC 50, Nor Imanah dan Ketua Kloter 65, Ahmadun. Menurut keduanya, ketepatan waktu menjadi kepuasan jemaah atau penumpang. (Ati/Jon)-f

Sambungan hal 1

Tersangka

umum akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogya.

"Setelah tahap II, nanti jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Ketika selesai, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," jelas Herwatan, Kamis (30/5). Tersangka akan disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus ini berawal pada tahun 2012 saat Pemerintah Kalurahan Candibinangun mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk menyewakan TKD Candibinangun di Padukuhan Bulus II Kembangan dan Samberebbe seluas 200.225 M2 kepada

PT Jogja Eco Wisata yang akan dimanfaatkan untuk Tempat Wisata dan Taman Rekreasi Water Park. Sesuai izin Gubernur ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun dan perjanjian sewa dilakukan peninjauan ulang/review setiap 3 tahun sekali serta pendapatan dari sewa menyewa ini harus dikelola melalui APBDes.

Dengan berlakunya PerGub No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Pasal 21 ayat 3) menyatakan 'besaran sewa berdasarkan hasil penilaian dari penilai public'. Namun ternyata tersangka tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018 terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari jasa penilai/appraisal. Tersangka hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya.

Uang sewa yang dibayarkan PT JEW

kepada Kalurahan Candibinangun oleh tersangka tidak dimasukkan dalam APBDes terlebih dahulu namun langsung memerintahkan untuk dibagikan kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa secara asal-asalan tidak sesuai dengan Peraturan Desa. Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk ke kas desa sangat kecil.

Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Pemerintah Daerah DIY, perbuatan tersangka Sismantoro telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.199.267.890. Terdiri dari kerugian dari kekurangan penerimaan kas desa atas pembayaran yang telah dilakukan PT JEW sebesar Rp 704.667.890 dan penyidik telah melakukan penyitaan uang Rp 297.900.000 dari perangkat desa. Kemudian kerugian dari harga sewa TKD oleh PT JEW yang terlalu rendah sebesar Rp 8.458.600.000. (Sni)-d

Sambungan hal 1

Pro

memberikan penjelasan untuk meredakan penolakan tersebut. Pun Menteri PUPR yang juga merupakan anggota komite Tapera tidak mampu menjelaskan secara gamblang, termasuk penjelasan presiden. Mengam dana Tapera akan dikembalikan kepada pekerja pada saatnya nanti, tapi segenap keraguan dan apatisme juga muncul. Kalau memang digunakan untuk bantuan pembelian perumahan dan sejenisnya, apakah diwajibkan untuk semua pekerja. Kalaupun bagi pekerja dengan UMR, apakah potongan gaji itu mampu mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah yang bagi mereka takut untuk membayangkannya.

Mungkin ada sisi baiknya dari potongan gaji untuk tapera, misalnya saat pengembalian akan mendapatkan dana beserta hasil pemupukannya. Tapi apakah itu lebih penting dibandingkan dengan desakan kebutuhan kelompok pekerja dengan UMR untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak saat ini. Sampai saat ini belum ada penjelasan ditengah kegaduhan ini dari pemerintah terutama dari Menteri PUPR, Menteri keuangan, Menteri tenaga kerja, dan otoritas jasa ke-

uangan yang merupakan komite tapera. Presiden pun hanya menjawab, bahwa pro kontra adalah biasa dan nantinya juga akan diterima. Gaya komunikasi seperti ini yang perlu diperbaiki supaya tidak lagi terjadi kegaduhan dimasa sulit.

Bersumber dari website BP Tapera, dana potongan tersebut nantinya akan dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi. Ini pun juga membutuhkan kepercayaan masyarakat yang berkaca pada kinerja pengelolaan dana masyarakat yang masih meragukan. Lebih penting dana potongan itu diinvestasikan ke deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat bergarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain dibandingkan urgensi pemenuhan pokok lain bagi pekerja.

Ini bukan dana kecil baik bagi pekerja maupun secara akumulatif. Seandainya jumlah pekerja di Indonesia sekitar 150 juta orang, dengan rata-rata gaji 3,5 juta saja, maka akan diperoleh 105.000 per pekerja sehingga akumulasinya 15,7 triliun rupiah per bulan dan 189 triliun rupiah setahunnya. Hindarkan ma-

syarakat untuk berfikir liar untuk apa pemerintah memanfaatkan dana ini ditengah utang luar negeri yang melambung dan kebutuhan dana untuk IKN.

Pemerintah perlu untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait penggunaan potongan gaji pekerja. Sosialisasi dan kejelasan informasi juga harus digencarkan kepada pekerja dan pemberi kerja dimasa yang sama sulitnya. Termasuk logika dan pertanyaan sederhana bagi pekerja yang awam. Kalau sudah punya rumah, mengapa diwajibkan ikut potongan, kalau untuk renovasi mereka punya cara sendiri yang lebih masuk akal. Kalau pun potongan itu terkumpul, butuh berapa puluh bahkan ratus tahun untuk bisa membeli rumah. Baiknya selain sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan, tunggulah kondisi kesejahteraan sedikit membaik, kalau pun pemerintah harus memilih waktu yang tepat, terutama bagi pekerja UMR dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

(Penulis adalah Ketua STIM YKPN, Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting, Pengurus ISEI dan Kafegama DIY)-f

Sambungan hal 1

Dikabulkan,

penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan itu, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri

atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat, adressat UU No 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.

(Ant/Obi)-d

Sambungan hal 1

Karen

dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/5).

Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Karen telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang

(UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. JPU juga menuntut Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Kemudian, Jaksa KPK menuntut Majelis Hakim untuk membebaskan pembayaran uang pengganti kepada pe-

rusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) sebesar 113,83 juta dolar AS dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp 7.500 kepada terdakwa. "Terdapat beberapa hal yang memberatkan tuntutan kepada Karen, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara hal yang meringankan tuntutan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan," ujar Wawan. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

Gunung

pada pukul 13.04 WIB dengan tinggi kolom abu teramat 2.000 meter di atas puncak atau 4.891 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Gunung Api (PGA) Ahmad Rifandi di Bukittinggi, Kamis (30/5).

Gunung api setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu saat ini berstatus Level III atau Siaga. PGA mencatat kolom abu teramat berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi sementara 2 menit 2 detik. "Gunung Marapi berada pada status Level III dengan rekomendasi masyarakat tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah verbeek)," katanya.

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi, diminta agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi, terutama saat

musim hujan.

Suara dentuman erupsi Gunung Marapi membuat warga di daerah Kabupaten Agam berhamburan keluar rumah. Sebagian dari mereka masih trauma dengan rentetan peristiwa dari efek erupsi. "Sejak

akhir 2023 lalu erupsi utama terjadi hingga kini, kami takut dengan suara letusan Marapi yang jelas terdengar. Apalagi musibah banjir lahar dingin sebulan lalu," kata seorang warga Ampek Angkek Agam, Atma Yulia (40). (Ant/San)-f



Prakiraan Cuaca						Jumat, 31 Mei 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Steman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	
Cerah		Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Petir		

Membangun Peradaban dari Pendidikan

Anggrismono, SE MEdDev
Kaprodi Ekonomi
Universitas Amikom Yogyakarta

PENDIDIKAN adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Berbagai isu seperti Ulang Kuliah Tunggal (UKT), relevansi pendidikan dengan kebutuhan

masyarakat, dan perdebatan mengenai status pendidikan sebagai barang publik atau privat menjadi sorotan utama dalam berbagai diskusi mengenai pendidikan di tanah air.

Salah satu masalah yang mengemuka adalah tingginya biaya UKT yang memberatkan mahasiswa, bahkan beberapa dari mereka berfikir untuk putus kuliah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara akses pendidikan dan kemampuan finansial masyarakat. Selain itu, pendekatan pendidikan yang cenderung berorientasi pada jenjang tersier juga dipertanyakan karena dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak di tingkat primer dan sekunder.

Pentingnya pendidikan vokasional sebagai alternatif untuk mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja juga mengemuka dalam beberapa diskusi. Pendidikan vokasional dianggap lebih mampu membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di pasar kerja. Namun, perdebatan mengenai apakah pendidikan seharusnya dianggap sebagai barang publik atau privat masih terus berlangsung, dengan implikasi yang signifikan terhadap tanggung jawab pemerintah dan skema pendanaan pendidikan.

Dalam konteks Islam, pendidikan memiliki posisi yang sangat penting. Rasulullah SAW bahkan pernah membebaskan tawanan dengan syarat mereka mengajarkan baca

tulis kepada umat Muslim. Hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai pendidikan dalam pandangan Islam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang kuat.

Tokoh-tokoh hebat seperti Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Khalid bin Walid, dan Umar bin Khattab adalah contoh bagaimana pendidikan Islam mampu melahirkan individu-individu yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Mereka menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari literasi, ilmu perang, hingga ilmu politik, yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam mendorong penguasaan beragam keahlian untuk kemashlahatan umat.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara konsep kesuksesan pendidikan dalam pandangan Barat dan Islam. Standar Barat seringkali mengukur kesuksesan pendidikan dari pencapaian akademis semata, sedangkan Islam menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan. Pendidikan agama, baik di rumah maupun di sekolah, menjadi kunci dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual yang kokoh.

Di Indonesia, isu mengenai pendaan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Anggaran pendidikan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pendidikan. Selain itu, implementasi undang-

undang terkait pendidikan seringkali tidak sesuai dengan harapan, terutama dalam hal pengelolaan dana pendidikan yang rawan penyelewengan.

Tingkat literasi masyarakat juga menjadi isu penting karena memiliki korelasi yang erat dengan berbagai aspek sosial, seperti tingkat kriminalitas, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan literasi harus menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan nasional.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Orientasi luaran pendidikan perlu diarahkan pada keseimbangan dalam hal membangun kepribadian, penguasaan ilmu agama dan

ilmu-ilmu kehidupan. Ketiga hal tersebut tidak diposisikan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ketiganya tidak diposisikan terpisah satu sama lain seperti pendidikan sekuler saat ini yang menyebabkan kegagalan membentuk karakter dan kepribadian mulia.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan peradaban. Dengan komitmen dan dilandasi ketakwaan terhadap Tuhan YME, kita dapat membangun sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi penerus dapat melaju pada arah yang benar sesuai dengan visi dan misi penciptaan manusia. Wallahua'lam. ***

